



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 27 Februari 2017

Halaman: 2

TUNGGU KEPALA DAERAH DEFINITIF Perubahan Parameter KMS Masih Dikaji

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Kota Yogya hingga saat ini masih mengkaji terkait rencana perubahan parameter pendataan calon penerima Kartu Menuju Sehat (KMS). Hasil kajian itu pun baru akan diajukan setelah terdapat kepala daerah secara definitif. Hal ini lantaran penetapan parameter membutuhkan surat keputusan walikota.

"Setelah ada penetapan kepala daerah yang baru, maka kami akan segera menyampaikan usulan perubahan parameter untuk pendataan calon penerima KMS," jelas Kepala Dinas Sosial Kota Yogya, Hadi Muchtar, Minggu (26/2).

Hadi Muhtar menjelaskan, berbagai kajian perlu dilakukan agar sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pemanfaatannya pun lebih maksimal. Selama lima tahun terakhir, parameter

pendataan calon penerima KMS dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogya Nomor 244/KEP/2012.

Di dalam surat keputusan tersebut terdapat tujuh aspek dan 17 indikator penilaian yang di antaranya meliputi pendapatan kepala keluarga, status tempat tinggal, hingga kemampuan membeli sandang dan pangan.

"Salah satu kajian yang akan digunakan untuk penyusunan parameter baru adalah banyaknya keluhan karena warga penerima KMS biasanya hanya memanfaatkannya untuk mempermudah siswa memperoleh sekolah negeri di Kota Yogya. Padahal penerima tersebut masuk dalam kategori keluarga mampu," paparnya.

Selain itu, Dinas Sosial juga menerima usulan pemberian tanda khusus di

tempat tinggal pemegang KMS. Hadi Muhtar berharap, parameter penerima KMS yang baru sudah bisa ditetapkan sebelum pertengahan tahun. Sehingga, begitu ditetapkan sebagai parameter baru, pihaknya bersama petugas di lapangan dapat segera bergerak untuk melakukan pendataan calon pemegang KMS 2018.

Hadi Muhtar memaparkan, KMS merupakan program afirmasi dari Pemkot Yogya kepada warga rentan miskin, miskin dan fakir miskin. Sehingga warga tersebut memperoleh berbagai kemudahan dari pemerintah dalam mengakses program perlindungan sosial. "Setiap tahun selalu kami perbarui datanya. Jadi, warga yang sudah tidak sesuai parameter, otomatis tidak bisa lagi memperoleh KMS," jelasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005